

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2004-2010

Norma Rita Sari, Arif Pujiyono

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Throughout Indonesia's economic growth is relatively increased. During 2004-2010 its growth decreased in 2009 due to the impact of the global economic crisis. On the other side, the income gap between regions is caused by the concentration of a regional investment. This research purposed to determine how much inequality between provinces in Indonesia, and to determine the leading sectors in each of 33 provinces in Indonesia so that economic growth can be achieved optimally. The analytical method used was the analysis of economic growth, location quotient (LQ), Shift-share, Klassentypology, Williamson index and inverted U hypothesis.

Results of this research showed that: the service and agriculture sector including within the potential sectors to promote economic growth in each province in Indonesia. There still provinces of Indonesia which were classified in the relatively backward province, there are 14 provinces including the relatively backward regions. Income disparities between provinces in Indonesia in 2004-2010 is high (> 0.5) and had declined tendency. While the Kuznets' inverted "U" hypothesis which describes the relationship between growth and inequality prevailing in the Province of Indonesia.

Based on these findings suggestions which could be submitted for the development of inter-provincial inequality in Indonesia is implementing development policies that prioritize the still relatively backward provinces without disregard upon the developed provinces which grown rapidly.

Keywords: *Economic growth, potential sectors, Klassen typology, income inequality, Kuznets hypothesis.*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2000). Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola seoptimal mungkin, dengan meningkatkan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah tinggi dan mengurangi ekspor bahan mentah. Indonesia juga memainkan peran yang makin besar di perekonomian global.

Tabel 1
Indeks Williamson Dan Laju Pertumbuhan Indonesia Tahun 2004-2010

Tahun	Indeks Williamson	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2004	0,81	5,0
2005	0,73	5,7
2006	0,81	5,5
2007	0,83	6,3
2008	0,84	6,0
2009	0,82	4,6
2010	0,82	6,2

Berdasarkan Tabel 1 telah terjadi ketimpangan pendapatan antar Provinsi pada tingkat level tinggi, hal ini ditunjukkan dengan besarnya indeks Williamson yang rata-rata di atas 0,8. Ketidakmerataan yang menyebabkan ketimpangan ini merupakan masalah yang harus dicarikan penyelesaiannya. Ketimpangan antar Provinsi disebabkan oleh terpusatnya investasi suatu daerah. Besaran investasi di tiap wilayah dan tiap sektor berbeda-beda. Keputusan investasi di tiap wilayah dan tiap sektor sangat dipengaruhi oleh dua pelaku utamanya, yaitu pengusaha dan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Pada awal pembangunan terjadi suatu dilema antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang. *Trade off* atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi. Pemerintah harus memilih sektor-sektor yang dapat berkembang guna mendorong kemajuan sektor-sektor lain hingga pada akhirnya dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

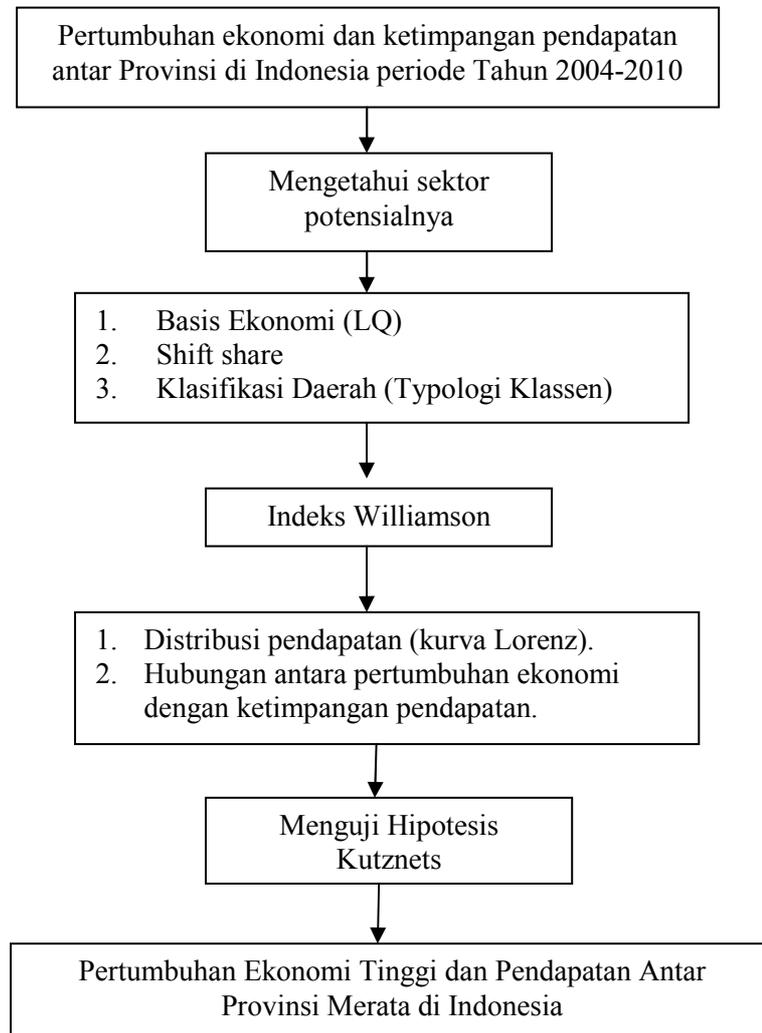
Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui sektor-sektor unggul di tiap Provinsi agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara optimal, sehingga menjadikan ketimpangan lebih rendah. Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka sangat menarik untuk menganalisis “ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2004-2010”.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Perekonomian suatu negara di perkuat dengan mempergunakan seluruh potensi yang dimiliki, sehingga bisa memperbesar nilai tambah yang dihasilkan serta berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang diperoleh oleh rakyatnya. Mempergunakan seluruh potensi ekonomi yang ada, suatu negara hendaknya mampu merencanakan dan menyusun beberapa perencanaan dan pembangunan bagi perekonomian negara tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan memiliki banyak potensi yang terdapat dalam tiap-tiap daerah untuk dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan sebaik mungkin. Seluruh potensi yang ada pada setiap daerah di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Untuk mengetahui sektor-sektor yang berpotensi di tiap daerah di Indonesia adalah dengan menggunakan alat analisis *LQ* dan *Shift Share*. Analisis *LQ* menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu daerah yang diselidiki dengan kemampuan yang sama dari daerah lain. *Shift Share* digunakan untuk mengetahui perubahan struktur/kinerja ekonomi daerah terhadap struktur ekonomi yang lebih tinggi. Tipologi *Klassen* digunakan untuk penetapan wilayah yang akan dikembangkan. Pembuktian Hipotesis Kuznet untuk mengetahui dapat tidaknya di terapkan di Indonesia.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Data yang diperlukan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data sekunder untuk periode tahun 2004-2010. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Analisis LQ (*Location Quotient*)

Metode *Location Quotient* digunakan untuk mengetahui sektor basis atau potensial suatu daerah tertentu. Metode ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di daerah dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas.

Rumus *Location Quotient* (LQ) adalah :

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t} \quad \text{atau} \quad \frac{v_i/V_i}{v_t/V_t} \quad \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- v_i : Nilai tambah sektor di tingkat daerah (provinsi) i
- v_t : PDRB di daerah tersebut (provinsi)
- V_i : Nilai tambah sektor di tingkat daerah yang lebih luas (Indonesia)
- V_t : PDRB di tingkat daerah yang lebih luas (Indonesia)

Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor basis.
2. Jika nilai $LQ = 1$, maka sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di daerahnya saja.
3. Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis dan perlu impor produk dari luar daerah karena sektor ini kurang prospektif untuk dikembangkan.

2. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional).

Analisis ini digunakan untuk melengkapi analisis LQ yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis *Shift Share* menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional (*national share*)
Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah. Nilai *national share* positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah (kabupaten/kota) yang tumbuh lebih lambat atau merosot dibandingkan dengan pertumbuhan secara nasional.
2. Pergeseran Proporsional (*proportional shift*)
Perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi propinsi atau nasional.
3. Pergeseran differensial (*differential shift*)
Informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi.

Tri Widodo (2006) menyatakan bahwa bentuk umum persamaan dari analisis *shift share* dan komponen-komponennya adalah :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

$$N_{ij} = E_{ij} \times R_n \dots \dots \dots (3)$$

$$M_{ij} = E_{ij} (R_{in} - R_n) \dots \dots \dots (4)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (R_{ij} - R_{in}) \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan :

D_{ij} = Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah dari pengaruh pertumbuhan nasional.

N_{ij} = Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian di suatu daerah.

M_{ij} = Pergeseran proporsional (*proportional shift*) atau pengaruh bauran industri

C_{ij} = Pengaruh keunggulan kompetitif suatu sektor tertentu (kab/kota) dibanding tingkat nasional

E_{ij} = PDRB (*output*) sektor i (kab/kota)

R_{ij} = Tingkat pertumbuhan sektor I (kab/kota)

R_{in} = Tingkat pertumbuhan sektor I

R_n = Tingkat pertumbuhan PDRB

3. Tipologi Klassen

Teknik Typologi Klassen dapat digunakan melalui dua pendekatan yang pertama adalah dengan pendekatan sektoral dan yang kedua adalah dengan pendekatan wilayah.

Menurut Tipologi Daerah, daerah dibagi menjadi 4 klasifikasi (Emilia Imelia, 2006)

1. Kuadran I : Daerah cepat maju dan cepat tumbuh
2. Kuadran II : Daerah maju tapi tertekan
3. Kuadran III : Daerah berkembang cepat
4. Kuadran IV : Daerah relatif tertinggal.

Tabel 2
Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral/Daerah

PDRB perkapita (y) Laju Pertumbuhan (r)	$Y_i > y$	$Y_i < y$
$R_i > r$	Kuadran I Daerah maju dan Tumbuh cepat	Kuadran II Daerah maju tapi tertekan
$R_i < r$	Kuadran III Daerah berkembang cepat	Kuadran IV Daerah relative tertinggal

Sumber : Emilia Imelia,2006

Dimana:

- R_i = laju pertumbuhan PDRB di propinsi i
- Y_i = Pendapatan perkapita propinsi i
- R = Laju pertumbuhan PDRB
- Y = Pendapatan perkapita rata-rata

4. Indeks Williamson

Kesenjangan pendapatan antar provinsi Indonesia dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson. Rumus dari Indeks Williamson adalah sebagai berikut (Arsyad,2004)

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}}{\bar{y}} \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan :

- CVw = Indeks Williamson
- f_i = Jumlah penduduk provinsi ke-i (jiwa)
- N = Jumlah penduduk indonesia (jiwa)
- Y_i = PDRB per kapita provinsi ke-i (Rupiah)
- y = PDRB per kapita rata-rata indonesia (Rupiah)

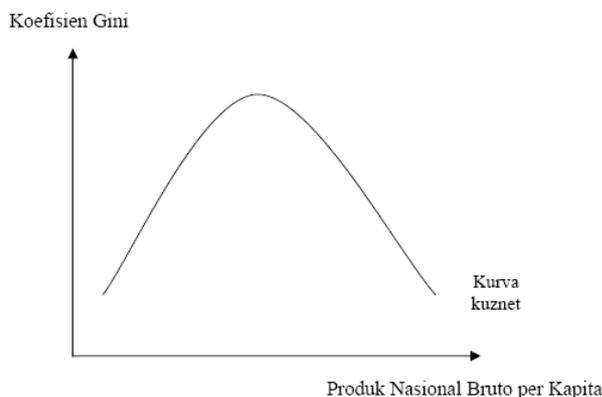
Besarnya Vw adalah $0 < Vw < 1$

5. Pembuktian Kuznets

Kuznets mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi.

Hal tersebut digambarkan dalam kurva Kuznets gambar 3.2, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif.

Gambar 2
Kurva Kuznet



Sumber: Todaro, 2003

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Sektor Potensi

Sektor Basis dengan Location Quotient (LQ)

Hasil Perhitungan LQ di Provinsi Indonesia tahun 2004-2010 dapat dilihat pada Tabel 3 :

Tabel 3
Hasil Perhitungan Analisis LQ 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2010

No.	Provinsi	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
1	Aceh	1,65	2,14	0,44	1,57	1,16	0,84	0,68	0,4	1,3
2	Sumatra utara	1,73	0,5	0,73	2,19	1,3	1	1,17	0,75	0,88
3	Sumatra barat	1,71	0,35	0,46	3,37	0,8	1,05	1,8	0,53	1,73
4	Riau	1,13	5,55	0,36	0,28	0,47	0,78	0,34	0,11	0,46
5	Kepulauan riau	0,33	0,69	1,89	0,62	0,56	1,3	0,55	0,48	0,22
6	Jambi	2,18	1,35	0,49	1,1	0,71	0,99	1,08	0,48	0,95
7	Sumatra selatan	1,4	2,78	0,64	0,67	1,21	0,78	0,62	0,42	0,83
8	Kepulauan bangka belitung	1,61	1,79	0,8	0,76	0,95	1,11	0,51	0,36	0,69
9	Bengkulu	2,7	0,7	0,14	0,62	0,46	1,13	1,11	0,48	1,71
10	Lampung	2,94	0,29	0,48	0,5	0,79	0,91	0,85	0,79	0,82
11	DKI jakarta	0,01	0,03	0,6	0,93	1,62	1,26	1,24	3,14	1,23
12	Jawa barat	0,97	0,93	1,38	3,32	0,9	1,05	0,57	0,39	0,73
13	Banten	0,6	0,01	1,79	6,06	0,47	1,02	1,25	0,37	0,51
14	Jawa tengah	1,44	0,12	1,17	1,18	0,92	1,24	0,59	0,39	1,11
15	DI yogyakarta	1,3	0,08	0,5	1,27	1,45	1,2	1,38	0,99	1,8
16	Jawa timur	1,1	0,22	0,91	2,22	0,5	1,65	0,77	0,51	1,48
17	Kalimantan barat	1,8	0,16	0,67	0,61	1,27	1,35	1	0,52	1,15
18	Kalimantan tengah	2,47	0,89	0,3	0,65	0,81	1,04	1,07	0,52	1,34
19	Kalimantan selatan	1,71	2,46	0,43	0,72	0,88	0,88	1,15	0,41	0,94
20	Kalimantan timur	0,85	4,25	1,02	2,33	0,85	0,39	0,55	0,24	0,32
21	Sulawaesi utara	1,41	1,02	0,27	1,01	2,43	0,85	1,56	0,66	1,61
22	Gorontalo	2,14	0,12	0,31	0,82	1,28	0,78	1,35	1,08	2,22
23	Sulawesi tengah	2,13	0,46	0,2	3,09	1,34	0,7	0,91	0,78	2,52
24	Sulawesi selatan	2,11	1,05	0,5	1,36	0,8	0,9	1,07	0,67	1,19
25	Sulawesi barat	3,63	0,08	0,29	0,53	0,6	0,75	0,4	0,58	1,54
26	Sulawesi tenggara	2,45	0,61	0,3	2,56	1,29	0,91	1,05	0,57	1,39
27	Bali	1,46	0,07	0,36	2,13	0,62	1,83	1,47	0,77	1,48
28	Nusa tenggara barat	1,74	2,95	0,17	0,47	1,14	0,83	1,02	0,52	1,09
29	Nusa tenggara timur	2,83	0,15	0,06	0,56	1,05	0,95	0,96	0,36	2,5
30	Maluku	2,3	0,09	0,18	0,75	0,22	1,27	1,77	0,64	2,01
31	Maluku utara	2,5	0,52	0,51	0,69	0,27	1,46	1,01	0,36	0,83
32	Papua	1,18	5,81	0,08	1,88	1	0,37	0,73	0,35	0,67
33	Papua barat	2	2,01	0,59	0,61	1,32	0,57	0,95	0,21	1,08

Sumber: PDRB Propinsi Indonesia tahun 2004-2010, data diolah

Tabel 4
Hasil Perhitungan Rata-rata Analisis Shift Share 33 Provinsi di Indonesia
Tahun 2004-2010

No.	Provinsi	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
1	Aceh	59.336	(110.896)	(47.000)	1.675	27.382	53.349	25.550	6.173	66.457
2	Sumatra utara	229.434	10.524	202.551	7.015	88.334	207.756	136.729	98.185	118.399
3	Sumatra barat	78.314	9.856	37.914	598.593	20.727	63.414	64.888	19.463	59.018
4	Riau	150.205	295.452	104.759	2.126	39.362	10.728.430	34.850	18.974	57.012
5	Kepulauan riau	15.449	9.060	184.402	5.302	27.768	92.783	21.533	19.715	10.405
6	Jambi	49.814	18.399	20.201	149	37.527	158.138	4.619	13.613	42.173
7	Sumatra selatan	111.274	78.085	87.004	2.986	53.236	88.402	47.295	28.542	57.315
8	Kep. bangka belitung	20.788	6.162	18.224	785	7.974	17.642	11.063	3.457	7.818
9	Bengkulu	27.702	258.793	3.045	482	2.379	15.122	6.387	4.136	14.301
10	Lampung	119.671	(1.550)	43.222	1.403	14.644	53.747	30.313	56.504	22.725
11	Dki jakarta	1.697	3.219	455.500	23.807	444.760	837.998	633.629	903.627	386.849
12	Jawa barat	335.263	25.855	1.157.755	67.989	139.527	704.496	156.400	99.284	200.201
13	Banten	17.052	698	85.507	15.495	16.316	1.459.045	56.169	28.177	24.644
14	Jawa tengah	311.002	21.237	6.546.366	16.554	108.910	358.415	1.191.687	65.918	176.673
15	Di yogyakarta	27.042	997	17.940	1.721	22.003	38.409	21.978	18.118	28.681
16	Jawa timur	374.085	81.583	671.161	42.866	85.961	1.123.300	288.622	192.585	34.321.606
17	Kalimantan barat	63.314	6.395	30.103	1.096	24.508	54.435	32.211	16.719	37.381
18	Kalimantan tengah	35.572	34.596	10.938	699	11.739	33.942	15.140	14.633	24.228
19	Kalimantan selatan	64.925	63.535	16.990	(253)	5.094	87.472	66.794	5.254	30.567
20	Kalimantan timur	50.181	378.097	85.531	3.594	47.570	105.624	72.562	41.916	20.516
21	Sulawaesi utara	34.729	790.888	11.550	1.534	27.823	33.014	26.380	12.239	23.496
22	Gorontalo	7.827	396	1.660	181	2.951	3.973	3.776	2.773	6.403
23	Sulawesi tengah	1.070.574	30.401	114.252	97.273	34.182	37.859	19.994	77.850	203.877
24	Sulawesi selatan	84.927	40.799	58.382	5.186	33.137	90.313	53.255	47.900	46.455
25	Sulawesi barat	19.353	784	3.355	316	3.117	7.259	1.946	4.290	7.340
26	Sulawesi tenggara	31.765	7.169	11.630	152.162	12.277	23.138	12.672	9.009	13.357
27	Bali	35.174	1.304	21.645	3.904	8.352	78.238	28.246	16.661	31.305
28	Nusa tenggara barat	34.546	49.045	8.833	844	15.203	28.966	14.681	11.450	19.154
29	Nusa tenggara timur	34.239	1.194	1.264	483	5.418	19.269	9.390	5.322	30.934
30	Maluku	10.368	232	1.686	(56)	1.028	10.361	5.186	1.838	6.917
31	Maluku utara	9.210	986	2.438	141	561	8.808	2.633	1.089	2.232
32	Papua	29.061	101.977	4.196	513	26.616	19.151	23.614	13.862	33.856
33	Papua barat	16.688	6.438	68.168	389	8.977	7.903	7.681	2.396	8.955

Sumber : data PDRB Provinsi Indonesia Tahun 2004-2010, data diolah.

Analisis *Location Quotient* (LQ) untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang termasuk sektor basis atau berpotensi ekspor dan yang bukan merupakan sektor basis. Hal tersebut dapat terlihat jika LQ menunjukkan angka lebih dari satu ($LQ > 1$) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Jika hasil menunjukkan angka kurang dari satu ($LQ < 1$) berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor basis.

Keterangan:

- S1= Sektor Pertanian
- S2= Sektor Pertambangan dan Galian
- S3= Sektor Industri Pengolahan
- S4= Sektor Listrik, Gas, dan Air
- S5= Sektor Bangunan
- S6= Sektor Perdagangan
- S7= Sektor Pengangkutan
- S8= Sektor Keuangan
- S9= Sektor Jasa-jasa

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata LQ 33 Provinsi di Indonesia dalam periode waktu tahun 2004-2010 dapat diketahui bahwa :

- 1) Provinsi Aceh memiliki 5 sektor basis: Pertanian; Pertambangan dan Galian; Listrik, Gas, dan Air bersih; Bangunan; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 4 sektor yaitu sektor Industri Pengolahan; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 2) Sumatra Utara memiliki 5 sektor basis: Pertanian; Listrik, Gas, Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; dan Pengangkutan dan Komunikasi dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 4 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 3) Sumatra Barat memiliki 5 sektor basis: Pertanian; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Jasa- Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 4 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 4) Riau memiliki 2 sektor basis: Pertanian; dan Pertambangan dan Galian dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 7 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 5) Kepulauan Riau memiliki 2 sektor basis: Industri Pengolahan; Perdagangan, Hotel, dan Restoran dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 7 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 6) Jambi memiliki 5 sektor basis: Pertanian; Pertambangan dan Galian; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; serta Pengangkutan dan Komunikasi dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 4 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 7) Sumatra Selatan memiliki 3 sektor basis: Pertanian; Pertambangan dan Galian; Bangunan dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor yang merupakan sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 6 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 8) Belitung memiliki 3 sektor basis: Pertanian; Pertambangan dan Galian; Perdagangan, Hotel, dan Restoran dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor yang merupakan sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 6 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 9) Bengkulu memiliki 4 sektor basis: Pertanian; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 5 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.

- 10) Lampung memiliki 1 sektor basis: Pertanian; dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 8 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 11) DKI Jakarta memiliki 5 sektor basis: Bangunan; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; Jasa – Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 4 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 12) Jawa Barat memiliki 3 sektor basis: Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel, dan Restoran dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 6 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 13) Banten memiliki 4 sektor basis: Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 5 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 14) Jawa tengah memiliki 5 sektor basis: Pertanian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 4 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 15) Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 6 sektor basis: Pertanian; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; dan Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 3 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 16) Jawa timur memiliki 4 sektor basis: Pertanian; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 5 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 17) Kalimantan Barat memiliki 5 sektor basis: Pertanian; Bangunan; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 4 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 18) Kalimantan Tengah memiliki 4 sektor basis: Pertanian; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; serta Jasa-Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 5 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 19) Kalimantan Selatan memiliki 3 sektor basis: Pertanian; Pertambangan dan Galian; Pengangkutan dan Komunikasi dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 6 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 20) Kalimantan Timur memiliki 3 sektor basis: Pertambangan dan Galian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 6 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 21) Sulawesi Utara memiliki 6 sektor basis: Pertanian; Pertambangan dan Galian; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Bangunan; Pengangkutan dan Komunikasi; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 3 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 22) Gorontalo memiliki 5 sektor basis: Pertanian; Bangunan; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 4 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 23) Sulawesi Tengah memiliki 4 sektor basis: Pertanian; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Bangunan; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 5 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.

- 24) Sulawesi Selatan memiliki 5 sektor basis: Pertanian; Pertambangan dan Galian; Listrik, Gas, dan Air Bersih ; Pengangkutan dan Komunikasi; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 4 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 25) Sulawesi Barat memiliki 2 sektor basis: Pertanian; Jasa – Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 7 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 26) Sulawesi Tenggara memiliki 5 sektor basis: Pertanian; Listrik, Gas, dan Air Bersih ; Bangunan; Pengangkutan dan Komunikasi; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 4 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 27) Bali memiliki 5 sektor basis: Pertanian; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 4 sektor dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 28) Nusa Tenggara Barat memiliki 5 sektor basis: Pertanian; Pertambangan dan Galian; Bangunan; Pengangkutan dan Komunikasi; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 4 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 29) Nusa Tenggara Timur memiliki 3 sektor basis: Pertanian; Bangunan; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 6 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 30) Maluku memiliki 4 sektor basis: Pertanian; Perdagangan, Hotel, dan Restoran ; Pengangkutan dan Komunikasi; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 5 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 31) Maluku Utara memiliki 3 sektor basis: Pertanian; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 6 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 32) Papua memiliki 4 sektor basis: Pertanian; Pertambangan dan Galian; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Bangunan dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 5 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.
- 33) Papua Barat memiliki 4 sektor basis: Pertanian; Pertambangan dan Galian; Bangunan; Jasa - Jasa dengan indeks LQ rata-rata lebih dari 1. Sektor bukan basis selama periode tahun 2004-2010 terdapat 5 sektor, dengan LQ rata-rata dibawah nilai 1 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata Shift Share 33 Provinsi di Indonesia dalam periode waktu tahun 2004-2010 dapat diketahui bahwa :

- a. Sektor Pertanian potensial tertinggi di provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kontribusi rata-rata sebesar 1.070.574.
- b. Sektor Pertambangan dan Galian potensial tertinggi di Sulawesi Utara mempunyai kontribusi rata-rata sebesar 790.888.
- c. Sektor Industri Pengolahan potensial tertinggi di Jawa Barat mempunyai kontribusi rata-rata sebesar 1.157.755.
- d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih potensial tertinggi di Sumatra Barat mempunyai kontribusi rata-rata sebesar 598.593.
- e. Sektor Bangunan potensial tertinggi di DKI Jakarta mempunyai kontribusi rata-rata sebesar 444.760.
- f. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran potensial tertinggi adalah di Riau mempunyai kontribusi rata-rata sebesar 10.728.430.
- g. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi potensial tertinggi adalah di Jawa Tengah mempunyai kontribusi rata-rata sebesar 1.191.687.
- h. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan potensial tertinggi adalah di DKI Jakarta mempunyai kontribusi rata-rata sebesar 903.627.

- i. Sektor Jasa-Jasa potensial tertinggi di Jawa Timur mempunyai kontribusi 34.321.606.

Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita provinsi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi ditentukan sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu : Kuadran I daerah maju dan Tumbuh cepat, Kuadran II daerah maju tapi tertekan, Kuadran III daerah berkembang cepat, dan Kuadran IV daerah relative tertinggal.

Tabel 5
Hasil PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi,
Dan Tipologi Klassen Dengan Pendekatan Wilayah
33 Provinsi Di Indonesia Tahun 2010

No.	Provinsi	LPE	PDRB Perkapita (dalam ribu rupiah)	Tipologi
1	Aceh	2.6	7358	IV
2	Sumatra Utara	6.3	9139	II
3	Sumatra Barat	5.9	8018	IV
4	Riau	4.2	17641	III
5	Kepulauan Riau	7.2	24467	I
6	Jambi	7.3	5648	II
7	Sumatra Selatan	5.4	8555	IV
8	Kepulauan Bangka Belitung	5.8	8883	IV
9	Bengkulu	5.1	4856	IV
10	Lampung	5.8	5035	IV
11	DKI Jakarta	6.5	41182	I
12	Jawa Barat	6.1	7476	II
13	Banten	5.9	7177	IV
14	Jawa Tengah	5.8	5775	IV
15	DI Yogyakarta	4.9	6087	IV
16	Jawa Timur	6.7	9133	II
17	Bali	5.8	7134	IV
18	Nusa Tenggara Barat	6.3	4457	II
19	Nusa Tenggara Timur	5.1	2676	IV
20	Kalimantan Barat	5.3	6891	IV
21	Kalimantan Tengah	6.5	8494	II
22	Kalimantan Selatan	5.6	8458	IV
23	Kalimantan Timur	4.9	31122	III
24	Sulawaesi Utara	7.1	8091	II
25	Gorontalo	7.6	2805	II
26	Sulawesi Tengah	7.8	6486	II
27	Sulawesi Selatan	8.2	6372	II
28	Sulawesi Barat	11.9	4095	II
29	Sulawesi Tenggara	8.2	5218	II
30	Maluku	6.5	2772	II
31	Maluku Utara	8.0	2924	II
32	Papua	-2.7	7984	IV
33	Papua Barat	26.8	11422	I
Total		6.1	9207	
Indonesia (PDB)		6.1	9723	

Sumber : Statistika Indonesia Tahun 2010, data diolah.

Tabel 6
Tipologi Klassen Pendekatan Wilayah
Di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2010

<p>Kuadran I Daerah Maju dan Tumbuh Cepat</p> <p>Kepulauan Riau, DKI Jakarta dan Papua Barat.</p>	<p>Kuadran II Daerah Maju tapi Tertekan</p> <p>Sumatra Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara.</p>
<p>Kuadran III Daerah Berkembang Cepat</p> <p>Riau dan Kalimantan Timur.</p>	<p>Kuadran IV Daerah Relatif Tertinggal</p> <p>Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua.</p>

Pengklasifikasian 33 Provinsi di Indonesia berdasarkan tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah di dapatkan hasil sebagai berikut :

1. Kuadran I : Provinsi Maju dan Tumbuh Cepat
Provinsi yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah Kepulauan Riau, DKI Jakarta dan Papua Barat. Provinsi yang masuk dalam kategori kuadran I umumnya daerah yang sudah maju baik dari segi pembangunan dan kecepatan pertumbuhan.
2. Kuadran II : Provinsi yang maju tapi tertekan.
Provinsi yang masuk dalam kategori ini adalah Sumatra Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara. Provinsi ini adalah provinsi yang maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, akibat tertekannya kegiatan utama provinsi yang bersangkutan.
3. Kuadran III : Provinsi berkembang cepat
Provinsi yang masuk dalam kategori ini adalah Riau dan Kalimantan Timur. Provinsi ini masih relatif rendah dibandingkan dengan provinsi yang lainnya, sehingga di masa yang akan datang harus terus dikembangkan agar diperoleh pendapatan perkapita yang tidak relatif rendah.
4. Kuadran IV : Provinsi yang relatif tertinggal
Provinsi yang masuk dalam kategori ini adalah Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Analisis Ketimpangan Pendapatan

Perbedaan PDRB perkapita antar Provinsi Indonesia memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Provinsi Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di wilayah Provinsi Indonesia, akan dibahas ketimpangan distribusi pendapatan antar Provinsi yang akan di analisis dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson.

Tingkat ketimpangan pendapatan antar Provinsi Indonesia yang dihitung menggunakan indeks ketimpangan Williamson selama tujuh tahun pengamatan.

Tabel 7
Indeks Williamson Dan Laju Pertumbuhan Indonesia Tahun 2004-2010

Tahun	Indeks Williamson	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2004	0,81	5,0
2005	0,73	5,7
2006	0,81	5,5
2007	0,83	6,3
2008	0,84	6,0
2009	0,82	4,6
2010	0,82	6,2

Berdasarkan Tabel 7 di Provinsi Indonesia telah terjadi ketimpangan pendapatan antar Provinsi pada tingkat level tinggi, hal ini ditunjukkan dengan besarnya indeks Williamson yang rata-rata di atas 0,8.

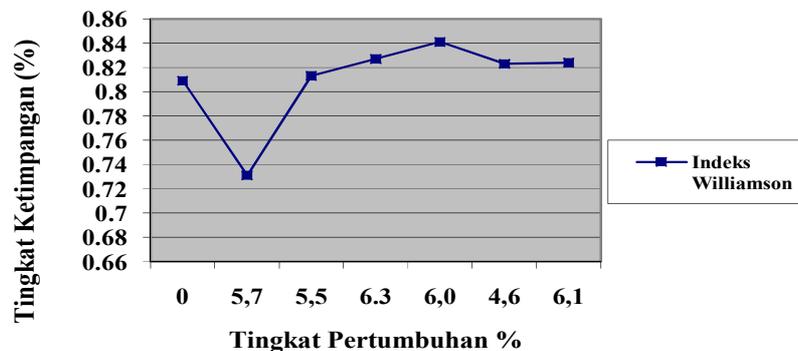
Pembuktian Kutznets

Pada periode tahun 2004-2010 kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 8
Pembuktian Kutznets
Di Indonesia Tahun 2004 – 2010

Tahun	PDRB	Pertumbuhan	Williamson	Pertambahan
2004	1.656.517	-	0,809	0
2005	1.750.815	5,7	0,731	-0,078
2006	1.847.127	5,5	0,813	0,082
2007	1.964.327	6,3	0,827	0,014
2008	2.082.456	6,0	0,841	0,014
2009	2.177.742	4,6	0,823	-0,018
2010	2.310.690	6,1	0,824	0,001

Gambar 3
Kurva Hubungan antara Indeks Ketimpangan dengan Pertumbuhan PDRB Provinsi Indonesia 2004-2010



Tingkat Ketimpangan Wilayah di ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia diukur selama periode penelitian tahun 2004-2010 cenderung mengalami penurunan tahun 2004-2005, namun terjadi peningkatan tahun 2006-2010. Sehingga dapat disimpulkan terbuktinya teori Kuznets di Indonesia tahun 2004-2010. Hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara pertumbuhan PDRB dan indeks ketimpangan selama periode pengamatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan model analisis *Location Quotient*, *shift share*, Tipologi Klassen, dan Indeks Williamson, dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni :

- a. Hasil analisis *Location Quotient* dan *Shift Share* dari sektor-sektor ekonomi di 33 provinsi di Indonesia, disimpulkan:
 - 1) Sektor Pertanian
Berdasarkan analisis LQ, provinsi yang memiliki potensi disektor pertanian adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
 - 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian
Berdasarkan analisis LQ, provinsi yang memiliki potensi disektor pertambangan dan penggalian adalah Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, Papua, dan Papua Barat.
 - 3) Sektor Industri Pengolahan
Berdasarkan analisis LQ, provinsi yang memiliki potensi disektor industri pengolahan adalah Kep. Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur.
 - 4) Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
Berdasarkan analisis LQ, provinsi yang memiliki potensi disektor listrik, gas dan air bersih adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Papua.
 - 5) Sektor Bangunan
Berdasarkan analisis LQ, provinsi yang memiliki potensi disektor bangunan adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat.
 - 6) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran
Berdasarkan analisis LQ, provinsi yang memiliki potensi disektor perdagangan, hotel, dan restoran adalah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Bali.
 - 7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Berdasarkan analisis LQ, provinsi yang memiliki potensi disektor pengangkutan dan komunikasi adalah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, Maluku, dan Maluku Utara.
 - 8) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Berdasarkan analisis LQ, provinsi yang memiliki potensi disektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan adalah DKI Jakarta dan Gorontalo.
 - 9) Sektor Jasa-jasa
Berdasarkan analisis LQ, provinsi yang memiliki potensi disektor jasa-jasa adalah Aceh, Sumatra Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,

- Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua Barat.
- b. Berdasarkan analisis Shift Share diperoleh beberapa hasil, yakni:
- 1) Nilai rata-rata *Shift Share* pada sektor pertanian yang tertinggi terdapat pada wilayah Sulawesi Tengah.
 - 2) Nilai rata-rata *Shift Share* pada sektor pertambangan dan penggalian yang tertinggi terdapat pada wilayah Sulawesi Utara
 - 3) Nilai rata-rata *Shift Share* pada sektor industri pengolahan yang tertinggi terdapat pada wilayah Jawa Barat.
 - 4) Nilai rata-rata *Shift Share* pada sektor listrik, gas dan air bersih yang tertinggi terdapat pada wilayah Sumatra Barat.
 - 5) Nilai rata-rata *Shift Share* pada sektor bangunan yang tertinggi terdapat pada wilayah DKI Jakarta.
 - 6) Nilai rata-rata *Shift Share* pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang tertinggi terdapat pada wilayah Riau.
 - 7) Nilai rata-rata *Shift Share* pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang tertinggi terdapat pada wilayah Jawa Tengah.
 - 8) Nilai rata-rata *Shift Share* pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang tertinggi terdapat pada wilayah DKI Jakarta.
 - 9) Nilai rata-rata *Shift Share* pada sektor jasa-jasa yang tertinggi terdapat pada wilayah Jawa Timur.
- c. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen menunjukkan banyak provinsi di Indonesia selama tahun 2004-2010 yang masuk kedalam daerah maju tapi tertekan dan daerah relatif tertinggal (termasuk dalam kuadran II dan IV). Sebanyak 14 provinsi pada kuadran II dan IV. Kuadran II daerah maju tapi tertekan antara lain : Sumatra Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara. Sedangkan Kuadran IV daerah relatif tertinggal antara lain : Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua.
- d. Hasil analisis tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia selama periode penelitian tahun 2004-2010 cenderung mengalami penurunan tahun 2004-2005 dari 0,809 ke 0,731, namun terjadi peningkatan tahun 2006-2008 dari 0,813 ke 0,841 tahun 2009-2010 terjadi peurunan kembali pada 0,823 ke 0,824. Dapat di simpulkan terbuktinya teori Kutznets di Indonesia tahun 2004-2010.

REFERENSI

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan Dan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Statistik Indonesia*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Fajar Utama, Putra, 2010. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Di Kabupaten/Kota Yang Tergabung Dalam Kawasan Kedung Sapur Tahun 2004-2008*. Skripsi Program Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Imelia, Emilia, 2006. *Modul Regional*, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Jambi.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta : AMP YKPN.
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan*, 1985, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Bima Grafika.
- Tarigan, Robinson M.R.P. 2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Ed. Revisi. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Todoaro, Michael P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.